

LAPORAN KEUANGAN

PERIODE SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2024

PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PENGAMBENGAN

Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan
Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
Kementerian Kelautan dan Perikanan

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/ pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).



Jemberana,
Kepala,

Juli 2024

Andi Mannojengi, S.St.Pi, M.Si
NIP. 19750417 200212 1 002

	Hal
Kata Pengantar	1
Daftar Isi	2
Pernyataan Tanggung Jawab	3
Ringkasan	4
I. Laporan Realisasi Anggaran	6
II. Neraca	7
III. Laporan Operasional	8
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	9
V. Catatan atas Laporan Keuangan	10
A. Penjelasan Umum	10
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	23
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	31
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	46
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	53
F. Pengungkapan Penting Lainnya	56
VI. Lampiran dan Daftar	57

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Semester 1 Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jembrana, Juli 2024

Kepala,



Andi Mannojengi, S.St.Pi, M.Si
NIP 19750417 200212 1 002

Laporan Keuangan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan Semester 1 Tahun 2024 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari 2024 sampai dengan 30 Juni 2024.

Realisasi Pendapatan Negara pada Semester 1 TA 2024 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 674,426,559,- atau mencapai 89 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp 760,971,000,-

Realisasi Belanja Negara pada periode yang berakhir 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp 7,022,929,747,- atau mencapai 47 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp 15,094,595,000,-

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 30 Juni 2024.

Nilai Aset per 30 Juni 2024 dicatat dan disajikan sebesar Rp 109,149,004,246,- yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp 231,383,292,-; Aset Tetap (neto) sebesar Rp 106,399,142,103,-; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0,-.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp 447,702,127,- dan Rp 108,701,302,119,-.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp 769,848,113,-, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp 10,261,323,323,- sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai (9,491,475,210). Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar (20,012,033),- dan sebesar Rp 0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar (9,511,487,243).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2024 adalah sebesar Rp 111,864,273,522,- dikurangi Defisit-LO sebesar Rp (9,511,487,243),-kemudian ditambah dengan koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas Rp 12,652,- dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp 6,348,503,188,- sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2024 adalah senilai Rp 108,701,302,119,-.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2024 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2024 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PENGAMBENGAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2024		% thd Angg	TA 2023
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	760,971,000	674,426,559	88.63	497,430,296
JUMLAH PENDAPATAN		760,971,000	674,426,559	88.63	497,430,296
BELANJA	B.2.				
Belanja Pegawai	B.3	5,701,376,000	3,562,913,709	62.49	2,555,563,023
Belanja Barang	B.4	7,788,856,000	3,031,476,130	38.92	3,755,908,456
Belanja Modal	B.5	1,604,363,000	428,539,908	26.71	1,152,400,878
Belanja Bantuan Sosial	B.6	-	-	-	-
JUMLAH BELANJA		15,094,595,000	7,022,929,747	46.53	7,463,872,357

PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PENGAMBENGAN
NERACA
PER 30 Juni 2024 DAN 31 Desember 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	DESEMBER 2024	DESEMBER 2023
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	123,000,000	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2		
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	-	-
Piutang Bukan Pajak	C.4	108,190,065	201,757,900
Bagian Lancar TP/TGR	C.5		
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.6		
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang PNBP	C.7	(2,464,673)	(11,202,160)
Belanja Dibayar di Muka	C.8	-	-
Pendapatan yang Masih harus Diterima	C.9	-	4,231,543
Persediaan	C.10	2,657,900	4,568,500
Jumlah Aset Lancar		231,383,292	199,355,783
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Tagihan TP/TGR	C.11		
Tagihan Penjualan Angsuran	C.12		
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.13		
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
ASET TETAP			
Tanah	C.14	53,445,501,000	53,445,501,000
Peralatan dan Mesin	C.15	17,265,593,191	16,864,253,611
Gedung dan Bangunan	C.16	25,304,542,373	25,304,542,373
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.17	132,764,529,186	132,764,529,186
Aset Tetap Lainnya	C.18	-	-
Konstruksi dalam pengerjaan	C.19	27,200,328	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.20	(122,408,223,975)	(119,038,854,408)
Aset Tetap Belum Diregister	C.21	(1,106,000)	-
Properti Investasi		2,680,409,415	2,680,409,415
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi		(160,824,564)	(134,020,470)
Jumlah Aset Tetap		108,917,620,954	111,886,360,707
ASET LAINNYA			
Aset Tidak Berwujud	C.22		
Aset Lain-Lain	C.23	22,196,690,000	22,224,988,000
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.24	(22,196,690,000)	(22,202,226,899)
Jumlah Aset Lainnya		-	22,761,101
JUMLAH ASET		109,149,004,246	112,108,477,591
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.25	123,000,000	-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.26	317,213,627	50,983,137
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.27	7,488,500	-
Pendapatan yang Ditangguhkan	C.28	-	-
Pendapatan Diterima di Muka	C.29	-	193,220,932
Beban yang Masih Harus Dibayar	C.30	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		447,702,127	244,204,069
JUMLAH KEWAJIBAN		447,702,127	244,204,069
EKUITAS DANA			
Ekuitas Dana Lancar	C.31		
Ekuitas Dana Investasi	C.32		
Ekuitas	C.33	108,701,302,119	111,864,273,522
JUMLAH EKUITAS DANA		108,701,302,119	111,864,273,522
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		109,149,004,246	112,108,477,591

III. LAPORAN OPERASIONAL

PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PENGAMBENGAN LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 Juni 2024 DAN 30 Juni 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	JUNI 2024	JUNI 2023
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	769,848,113	183,342,350
JUMLAH PENDAPATAN		769,848,113	183,342,350
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	3,792,834,509	2,717,122,125
Beban Persediaan	D.3	37,599,360	19,513,970
Beban Barang dan Jasa	D.4	2,098,199,020	2,661,222,392
Beban Pemeliharaan	D.5	424,337,919	422,259,617
Beban Perjalanan Dinas	D.6	520,685,064	887,332,758
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	3,396,392,286	4,474,844,271
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	(8,724,835)	(325,083)
JUMLAH BEBAN		10,261,323,323	11,181,970,050
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(9,491,475,210)	(10,998,627,700)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.11		
Surplus Penjualan Aset Nonlancar		(22,542,476)	-
Defisit Penjualan Aset Non Lancar		-	-
Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		2,530,443	89,790,673
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		2,530,443	93,725,673
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	3,935,000
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		(20,012,033)	89,790,673
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(9,511,487,243)	(10,908,837,027)
POS LUAR BIASA	D.12		
Pendapatan PNB		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PENGAMBENGAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 Juni 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	JUNI 2024	JUNI 2023
EKUITAS AWAL	E.1	111,864,273,522	114,347,484,191
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(9,511,487,243)	(10,908,837,027)
PENYESUAIAN NILAI TAHUN BERJALAN		-	-
Penyesuaian Nilai Aset		-	-
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR		12,652	(63,397,985)
LAIN-LAIN			
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3	-	-
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E.4	-	-
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluai	E.5	-	(55,544,613)
KOREKSI ATAS PENDAPATAN	E.6	12,652	(7,853,372)
KOREKSI LAIN-LAIN -- HIBAH MASUK/KELUAR	E.7		
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS		6,348,503,188	6,966,442,061
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		(3,162,971,403)	(4,005,792,951)
EKUITAS AKHIR	E.8	108,701,302,119	110,341,691,240

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambangan

Dasar Hukum Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambangan (PPNP) awal mulanya adalah PPI Pengambangan yang dibangun pada tahun 1976/1977. Pada Tahun 1988 dilakukan study kelayakan oleh Fisheries Infrastructure Sector Project dengan Consultant Roger Consulting Marine Gmbh. Sejak Tahun 2000 dilakukan pembangunan fasilitas dermaga dan breakwater. Berdasarkan Surat Persetujuan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara RI Nomor : B/2712/M.PAN/12/2005 tanggal 30 Desember 2005. Hal Penataan organisasi unit pelaksana teknis di lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan, ditingkatkan kelasnya menjadi Pelabuhan Perikanan Pantai Pengambangan dan ditetapkan menjadi eselon IVa.

Entitas dan Rencana Strategis Kemudian, berdasarkan Surat Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara RI Nomor : B/2672/M.PAN/9/2008 tanggal 11 September 2008 ditingkatkan lagi kelasnya menjadi Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambangan dan ditetapkan menjadi eselon IIIa, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19/MEN/2008 tanggal 6 Oktober 2008.

Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambangan terletak pada posisi 080 23' 46" Lintang Selatan dan 1140 34' 47" Bujur Timur, terletak di Jl. Pelabuhan No. 1 Desa Pengambangan, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Propinsi BALI. Berjarak 9 KM dari Kota Negara dan 105 KM dari Kota Denpasar, menghadap ke Samudera Hindia dan Selat Bali.

Formulasi Implementasi rencana strategis (RENSTRA) digunakan sebagai penuntun pelaksanaan

strategi yang terpilih dalam mendukung visi dan misi serta memperhatikan sasaran jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek yang ditetapkan oleh PPN Pengambangan.

Visi PPN Pengambangan dalam rangka mendukung visi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap adalah **”PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PENGAMBENGAN SEBAGAI PUSAT PENGEMBANGAN EKONOMI PERIKANAN TERPADU TAHUN 2024”**

PPN Pengambangan dipandang sebagai sentra yang berfungsi sebagai motor dalam pengembangan dan pembangunan khususnya sektor kelautan dan perikanan di wilayah Propinsi Bali.

Pengembangan ekonomi perikanan, menyiratkan seluruh kegiatan yang berlangsung di PPN Pengambangan mulai dari penyediaan bahan baku, pengolahan ikan sampai pemasaran hasil perikanan serta kegiatan-kegiatan penunjang lainnya.

Misi yang diemban PPN Pengambangan :

1. Meningkatkan fasilitas dan fungsi pelabuhan perikanan yang dapat menampung kegiatan perikanan secara efisien, efektif, bertanggungjawab, lestari dan berkelanjutan.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan di PPN Pengambangan serta pendapatan dan kesejahteraan masyarakat perikanan.
3. Mendorong peningkatan nilai produksi, pengolahan, pengawasan hasil perikanan serta investasi.
4. Menyediakan informasi, IPTEK serta data kelautan dan perikanan.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2024 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambangan. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambangan menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas

diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar
Pengukuran*

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2017 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

yang merupakan entitas pelaporan dari Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambangan adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-
LRA*

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan-
LO*

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:

- Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
- Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
- Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

- b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang	

	Negara/DJKN	
--	-------------	--

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari

Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

- c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
 - Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

*Penyusutan
Aset Tetap*

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan

penghapusan.

- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang
Jangka
Panjang*

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar,

Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

*Implementasi
Akuntansi
Pemerintah
Berbasis
Akrual
Pertama Kali*

(8) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali

Mulai tahun 2016 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2016 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas dapat dipenuhi.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, *Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambangan* telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebanyak empat kali dari DIPA awal, pagu awal sebesar Rp. 15,094,595,000,- setelah revisi terakhir menjadi Rp. 15,094,595,000,-. Tidak adanya perubahan jumlah total pagu akan tetapi karena adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Sehingga pagu anggaran terlihat dalam tabel berikut:

Uraian	2024	
	Anggaran Semula	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Pendapatan Jasa Pelabuhan	491,351,000	491,351,000
Pendapatan Sarana dan Prasarana	269,620,000	269,620,000
Jumlah Pendapatan	760,971,000	760,971,000
Belanja		
Belanja Pegawai	5,701,376,000	5,701,376,000
Belanja Barang	7,788,856,000	7,788,856,000
Belanja Modal	1,604,363,000	1,604,363,000
Belanja Bantuan Sosial	-	-
Jumlah Belanja	15,094,595,000	15,094,595,000

*Realisasi
Pendapatan
Rp674,426,559*

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp 674,426,559,- atau mencapai 89 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp 760,971,000,-. Pendapatan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambangan terdiri dari Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi, Pendapatan Jasa Pelabuhan Perikanan, dan Pendapatan Jasa Lainnya. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	Tahun 2024		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	269,620,000	422,466,191	156.69
Pendapatan Jasa Pelabuhan Perikanan	491,351,000	249,429,925	50.76
Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	-	-	-
Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL	-	2,530,443	
Jumlah	760,971,000	674,426,559	88.63

Realisasi Pendapatan dari Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi senilai Rp422,466,191,- merupakan pendapatan yang berasal dari sewa bangunan, lahan, sarana dan prasarana. Pendapatan Jasa Pelabuhan Perikanan senilai Rp249,429,925,- merupakan pendapatan dari pas masuk, tambat labuh, penggunaan air, es, cool storage dan jasa kebersihan. Sedangkan penerimaan kembali belanja barang senilai Rp2,530,443,- merupakan pendapatan dari pengembalian uang makan, tukin tahun 2023.

Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI TA. 2024	REALISASI TA. 2023	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	422,466,191	91,425,820	362.09
Pendapatan Jasa Pelabuhan Perikanan	249,429,925	312,278,803	-20.13
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	2,530,443	38,181,060	-93
Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL	-	55,544,613	-100
JUMLAH	674,426,559	497,430,296	35.58

Realisasi
Belanja
Negara Rp
7,022,929,747

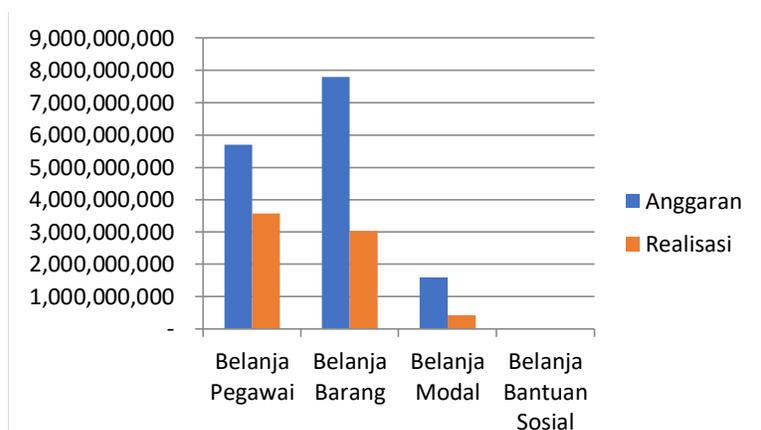
B.2 Belanja

Realisasi Belanja instansi pada TA 2024 adalah sebesar Rp 7,022,929,747,- atau 47% dari anggaran belanja sebesar Rp 15,094,595,000,-. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2024

URAIAN	Tahun 2024		
	Anggaran	REALISASI	% Realisasi Anggaran
Belanja Pegawai	5,701,376,000	3,562,913,709	62.49%
Belanja Barang	7,788,856,000	3,031,476,130	38.92%
Belanja Modal	1,604,363,000	428,539,908	26.71%
Belanja Bantuan Sosial	-	-	0.00%
Jumlah	15,094,595,000	7,022,929,747	46.53%

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Dibandingkan dengan TA 2023, Realisasi Belanja TA 2024 mengalami kenaikan sebesar 5,91% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya.

Perbandingan Realisasi Belanja TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI JUNI 2024	REALISASI JUNI 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	3,562,913,709	2,555,563,023	39.42
Belanja Barang	3,031,476,130	3,755,908,456	(19.29)
Belanja Modal	428,539,908	1,152,400,878	(62.81)
Belanja Sosial	-	-	-
Jumlah	7,022,929,747	7,463,872,357	(5.91)

B.3 Belanja Pegawai

Belanja

Pegawai

Rp3,562,913,709

Realisasi Belanja Pegawai TA 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 3,562,913,709,- dan Rp 2.555.563.023,-. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja TA 2024 mengalami kenaikan sebesar 39,42 persen dari TA 2023 karena adanya penambahan pegawai Non PNS.

Perbandingan Belanja Pegawai TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI TA 2024	REALISASI TA 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	1,361,495,404	1,315,103,790	3.53
Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS	567,076,128	123,043,230	360.88
Belanja Honorarium	0	0	-
Belanja Lembur	22,023,000	15,193,000	44.95
Belanja Vakasi	-	-	-
Belanja Tunj Khusus & Belanja Pegawai Transito	1,612,319,865	1,102,778,159	
Jumlah Belanja Kotor	3,562,914,397	2,556,118,179	39.39
Pengembalian Belanja Pegawai	(688)	(555,156)	(99.88)
Jumlah Belanja	3,562,913,709	2,555,563,023	39.42

Belanja

Barang

Rp3,031,476,130

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang TA 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 3,031,476,130,- dan Rp 3.755.908.456,- Realisasi Belanja Barang TA 2024 mengalami penurunan 19,29 % dari Realisasi Belanja Barang TA 2023.

Perbandingan Belanja Barang TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI TA 2024	REALISASI TA 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	448,935,616	722,068,416	(37.83)
Belanja Barang Non Operasional	240,754,300	396,779,000	(39.32)
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	35,688,760	25,294,520	41.09
Belanja Jasa	1,386,941,741	1,389,893,052	(0.21)
Belanja Pemeliharaan	401,350,649	422,259,617	(4.95)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	517,805,064	799,613,851	(35.24)
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masy.	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	3,031,476,130	3,755,908,456	(19.29)
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	3,031,476,130	3,755,908,456	(19.29)

B.5 Belanja Modal

*Belanja
Modal Rp
428,539,908*

Realisasi Belanja Modal TA 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 428,539,908,- dan Rp Rp 1.152.400.878,- . Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada TA 2024 mengalami kenaikan dibandingkan TA 2023 disebabkan karena adanya pelaksanaan pembangunan/pengembangan fasilitas pelabuhan perikanan di PP Perintis, serta pembangunan pagar, tempat parkir, taman dan peningkatan gedung pelayanan terpadu di PPN Pengambengan.

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi tersebut pada TA 2024 tidak mengalami kenaikan maupun penurunan dibandingkan TA 2023.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI TA 2024	REALISASI TA 2023	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	0	0	0.00
Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah	0	0	0.00
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	0	0	0.00
Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah	0	0	0.00
Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah	0	0	0.00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0.00
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	0	0	0.00

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp401.339.580,- dan Rp158.814.080,- Realisasi tersebut pada TA 2024 mengalami penurunan dibandingkan TA 2023.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI TA 2024	REALISASI TA 2023	NAIK (TURUN) %
Hand Palet Truck	5,006,100	0	100.00
Mesin Pompa air PMK	13,600,000	0	100.00
LCD Projector/Infocus	21,000,000	0	100.00
Kursi Besi/Metal	27,506,000	0	100.00
Drone	63,000,000	0	100.00
Unit Tranceiver Ssb Stationery	38,750,000	0	100.00
Timbangan Elektronik	3,842,820	0	100.00
Meja Kerja Stainless	11,000,000	0	100.00
Laptop	163,400,000	68,398,200	138.90
3 Printer (Peralatan Personal Komputer)	18,000,000	0	100.00
Overhaul Mesin Kendaraan Toyota Kijang Innov	36,234,660	0	100.00
Mini Lab	0	15,595,500	(100.00)
Meubelair Kantor	0	42,999,180	(100.00)
AC	0	31,821,200	(100.00)
Jumlah Belanja Kotor	401,339,580	158,814,080	152.71
Pengembalian	-	0	-
Jumlah Belanja	401,339,580	158,814,080	152.71

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp916.300.884,-.

Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	712,977,404	-100.00
Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	0	203,323,480	-100.00
Jumlah Belanja Kotor	0	916,300,884	-100.00
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	0	916,300,884	-100.00

Terdapat anggaran belanja gedung dan bangunan pada TA 2024 berupa pekerjaan Konstruksi Pengembangan PPN Pengembangan senilai Rp. 200.000.000,- hanya saja sampai periode pelaporan anggaran masih diblokir.

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Realisasi Belanja Modal TA 2024 tidak mengalami kenaikan maupun penurunan dibandingkan Realisasi TA 2023.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BELANJA	T.A. 2024	T.A. 2023	Naik (Turun) %
Belanja Modal Jaringan	0	0	0.00
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Jaringan	0	0	0.00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0.00
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	0	0	0.00

B.5.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 27,200,328 dan Rp 77.285.914. Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2024 tidak mengalami kenaikan maupun penurunan dibandingkan Realisasi TA 2023.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2023	REALISASI T.A. 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Lainnya	27,200,328	77,285,914	-64.81
Jumlah Belanja Kotor	27,200,328	77,285,914	-64.81
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	27,200,328	77,285,914	-64.81

Belanja Modal Lainnya merupakan Pembangunan dan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Teluk Awang berupa Konsultan Perencana Rehab Treastle Dermaga.

*Belanja
Bantuan
Sosial Rp0*

B.6 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja bantuan sosial merupakan belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Realisasi tersebut pada TA 2024 tidak mengalami kenaikan maupun penurunan dibandingkan TA 2023.

Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A. 2022	REALISASI T.A. 2021	NAIK (TURUN) %
Belanja Sosial	0	0	
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0.00
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	0	0	0.00

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

*Kas di
Bendahara
Pengeluaran
Rp123,000,000*

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 123,000,000,- dan Rp 0,- yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung-jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

Keterangan	TH 2024	TH 2023
Saldo UP	120,120,000	-
Kuitansi UP Belum di SPJ-kan	2,880,000	-
Jumlah	123,000,000	-

*Kas di
Bendahara
Penerimaan
Rp 0*

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 adalah sebesar masing-masing Rp0 dan Rp0 Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan

Keterangan	TH 2023	TH 2022
Uang Tunai	-	-
PT. BRI (Persero) Tbk, Cabang Negara	-	-
Jumlah	-	-

*Kas Lainnya
dan Setara Kas
Rp0*

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0,- .

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas

Keterangan	Tahun 2024	Tahun 2023
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	-	-
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	-	-
Kas Lainnya dari Hibah	-	-
Jumlah	-	-

*Piutang PNBP
Rp 108,190,065*

C.4 Piutang PNBP

Saldo Piutang PNBP per tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp 108,190,065 dan Rp 201,757,900,- Piutang PNBP merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang PNBP disajikan sebagai berikut:

Rincian Piutang PNBP

Uraian	TH 2024	TH 2023
Piutang PNBP	108,190,065	199,227,457
Piutang Lainnya	-	2,530,443
Jumlah	108,190,065	201,757,900

Terdapat beberapa piutang pada tanggal pelaporan per 30 Juni 2024 belum dilakukan pelunasan sebagaimana rincian piutang terlampir

Bagian Lancar
Tagihan
TP/TGR
Rp0

C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 30 Juni 2024 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar TP/TGR merupakan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Bagian Lancar TP/TGR adalah sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar TP/TGR TA 2024 dan 2018

No	Nama	Tahun 2024	Tahun 2023
1		-	-
2		-	-
3		-	-
Jumlah		-	-

Bagian Lancar
TPA
Rp0

C.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar TPA merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar TPA

No	Nama	TH 2024	TH 2023
1		-	-
2		-	-
3		-	-
Jumlah		-	-

*Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih –
Piutang Lancar
Rp (2,464,673)*

C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Lancar

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp (2,464,673) dan Rp (11,202,160). Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Pendek	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar		5%	-
Kurang Lancar	108,190,065	10%	2,464,673
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah	108,190,065		2,464,673
Bagian Lancar TP/TGR			
Lancar	-	0.00%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah	-		-
Bagian Lancar TPA			
Lancar	-	0.00%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah	-		-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	108,190,065		-

*Beban Dibayar
di Muka Rp0*

C.8 Beban Dibayar di Muka

Saldo Beban Dibayar di Muka per tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Beban dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Belanja Dibayar di Muka adalah sebagai berikut: *Rincian Belanja Dibayar di Muka*

Jenis	TH 2024	TH 2023
Pembayaran Internet	-	-
Pembayaran Sewa Peralatan dan Mesin	-	-
Pembayaran Sewa Gedung Kantor	-	-
Jumlah	-	-

*Pendapatan
yang Masih
Harus Diterima
Rp0*

C.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp4,231,543.

Pendapatan yang Masih Harus Diterima merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa. Pendapatan yang Masih Harus Diterima merupakan pendapatan atas tambat, labuh dan jasa kebersihan kapal dan pada tanggal 1 Januari 2024 sudah meninggalkan kolam labuh. Rincian Pendapatan Yang Masih Harus Diterima berdasarkan jenis pendapatan sebagaimana terlampir.

*Perbandingan Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima
TA 2024 dan 2023*

Jenis	TH 2024	TH 2023
Pendapatan Jasa Pelabuhan	-	4,231,543
Pendapatan Jasa Pelabuhan Lainnya	-	-
Jumlah	-	4,231,543

*Persediaan
Rp2,657,900*

C.10 Persediaan

Nilai Persediaan per 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp 2,657,900,- dan Rp.4,568,500,-. Nilai Persediaan per 30 Juni 2024 terdiri dari saldo awal Rp.4,568,500,- ditambah pembelian belanja Rp.35.688.760,- dikurangi pengeluaran Rp. 37.599.360,-

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan

Jenis	TH 2024	TH 2023
Barang Konsumsi	2,657,900	4,568,500
Barang untuk Pemeliharaan	-	-
Suku Cadang	-	-
Persediaan Lainnya	-	-
Jumlah	2,657,900	4,568,500

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

Tagihan
TP/TGR
Rp0

C.11 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Tagihan TP/TGR TA 2024 dan 2023

No	Debitur	Tahun 2021	Tahun 2020
1		-	-
2		-	-
3		-	-
Jumlah		-	-

Tagihan
Penjualan
Angsuran
Rp0

C.12 Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi. Rincian Tagihan PA untuk masing-masing debitur adalah sebagai

berikut:

Rincian Tagihan TPA

No	Debitur	TH 2024	TH 2023
1		-	-
2		-	-
3		-	-
Jumlah		-	-

*Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih –
Piutang Jangka
Panjang
Rp0*

C.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih–Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih– Piutang Jangka Panjang untuk masing-masing kualitas piutang adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang TA 2024

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Panjang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Tagihan TP/TGR			
Lancar	-	0.00%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah	-		-
Tagihan PA			
Lancar	-	0.00%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah	-		-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih		-	-

C.14 Tanah

Tanah

Rp53,445,501,000

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambangan per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp 53,445,501,000,- dan Rp 53,445,501,000,-. Mutasi nilai tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	53,445,501,000
Mutasi tambah:	0
Pembelian	0
Mutasi kurang:	
Penyitaan pengadilan	0
Saldo per 30 Juni 2024	53,445,501,000

Rincian saldo Tanah per 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Tanah

No	Luas	Lokasi	Nilai
1	121.580 m2	Jl. Pelabuhan No.1 Pengambangan Kec. Negara	53,445,501,000
Jumlah			53,445,501,000

Peralatan dan

Mesin

Rp17,265,593,191

C.15 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah Rp17,265,593,191,- dan Rp16,864,253,611,-. Terdapat mutasi kurang berupa transfer keluar satu unit forklift ke Pelabuhan Perikanan Merauke. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	16,864,253,611
Mutasi tambah :	401,339,580
Pembelian	365,104,920
Penambahan Nilai Alsin	36,234,660
Mutasi kurang :	0
Saldo per 30 Juni 2024	17,265,593,191
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2024	(15,208,940,777)
Nilai Buku per 30 Juni 2024	2,056,652,414

Mutasi Tambah atas nilai peralatan dan mesin senilai Rp 401,339,580,- berasal dari :

a. Pembelian berupa :

- 5 Unit Hand Palet Truck senilai Rp. 5,006,100
- 2 Unit Mesin Pompa air PMK senilai Rp. 13,600,000
- 3 Unit LCD Projector/Infocus senilai Rp. 21,000,000
- 25 Unit Kursi Besi/Metal senilai Rp. 27,506,000
- 1 Unit Drone senilai Rp. 63,000,000
- 2 Unit Unit Tranceiver Ssb Stationery senilai Rp. 38,750,000
- 2 Unit Timbangan Elektronik senilai Rp. 3,842,820
- 2 Unit Meja Kerja Stainless senilai Rp. 11,000,000
- 16 Unit Lap Top senilai Rp. 163,400,000
- 6 Unit Printer (Peralatan Personal Komputer) senilai Rp. 18,000,000

b. Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin berupa :

- Overhoul Mesin Kendaraan Toyota Kijang Innova senilai Rp. 36,234,660

C.16 Gedung dan Bangunan

*Gedung dan
Bangunan
Rp
25,304,542,373*

Nilai Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah Rp 25,304,542,373,- dan Rp 25,304,542,373,-. Tidak terdapat mutasi tambah maupun mutasi kurang pada tanggal pelaporan

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	25,304,542,373
Mutasi tambah:	-
Mutasi kurang:	-
Saldo per 30 Juni 2024	25,304,542,373
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2024	(2,464,880,683)
Nilai Buku per 30 Juni 2024	22,839,661,690

C.17 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

*Jalan, Jaringan
dan Irigasi
Rp132,764,529,186*

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp132,764,529,186,- dan Rp132,764,529,186,-. Tidak terdapat mutasi tambah maupun mutasi kurang pada tanggal pelaporan

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	132,764,529,186
Mutasi tambah:	-
Transfer Masuk	-
Mutasi kurang:	-
Saldo per 30 Juni 2024	132,764,529,186
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2024	(104,734,402,515)
Nilai Buku per 30 Juni 2024	28,030,126,671

*Aset Tetap
Lainnya
Rp0*

C.18 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah Rp0,- dan Rp 0-. Tidak terdapat mutasi tambah maupun mutasi kurang pada tanggal pelaporan

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	-
Mutasi tambah:	-
transfer masuk	-
Mutasi kurang:	-
Saldo per 30 Juni 2024	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2024	-
Nilai Buku per 30 Juni 2024	-

*Konstruksi
Dalam
Pengerjaan
Rp 27,200,328*

C.19 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 27,200,328,- dan Rp0,-.

A. Saldo Awal	-
B. Mutasi Tambah	
- Perolehan/Penambahan KDP	27,200,328
- Pengembangan KDP	
C. Mutasi Kurang	
D. Saldo Akhir	27,200,328

Penjelasan mutasi penambahan atas nilai Konstruksi Dalam pengerjaan adalah sebagai berikut:

Mutasi tambah atas nilai Konstruksi Dalam pengerjaan senilai Rp27,200,328,- berasal dari:

NO	SPM		PENGUNAAN	NILAI
	NOMER	TANGGAL		
1	00092	19-03-2024	Konsultan Perencana Rehab Treastle Dermaga	27,200,328
TOTAL				27,200,328

*Akumulasi
Penyusutan
Aset Tetap
(Rp
144,604,913,975)*

C.20 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing Rp 144,604,913,975,- dan Rp 116.018.618.228,- . Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	17,265,593,191	15,208,940,777	2,056,652,414
2	Gedung dan Bangunan	25,304,542,373	2,464,880,683	22,839,661,690
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	132,764,529,186	104,734,402,515	28,030,126,671
4	Aset Tetap Yg Tdk Digunakan	22,196,690,000	22,196,690,000	0
Akumulasi Penyusutan		197,531,354,750	144,604,913,975	52,926,440,775

C.21 Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud Rp0

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah Rp0 dan Rp0. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	-
Mutasi tambah:	
Pembelian	-
Mutasi kurang:	-
Saldo per 30 Juni 2024	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2024	-
Nilai Buku per 30 Juni 2024	-

Aset Lain-Lain Rp 0,-

C.22 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah Rp 0,- dan Rp 0,-. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2023	22,224,988,000
Mutasi tambah:	
Mutasi kurang:	(28,298,000)
Saldo per 31 Desember 2024	22,196,690,000
Akumulasi Penyusutan	(22,196,690,000)
Nilai Buku per 31 Desember 2024	-

Mutasi kurang atas nilai Aset Lainnya senilai Rp 28.298.000,- berasal dari :

Penghapusan BMN sesuai dengan SK Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 91/KEPMEN-KP/SJ/PL.750/2024 tanggal 31 Januari 2024 (terlampir) berupa :

- 1 Unit Bangunan MCK senilai Rp. 28.298.000

C.23 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

*Akumulasi
Penyusutan
dan Amortisasi
Aset Lainnya
(Rp 22,196,690,000)*

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah Devisit masing-masing (Rp 22,196,690,000,-) dan (Rp22,202,226,899,-) . Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud			
Komputer Unit	0	0	0
Jumlah	0	0	0
Aset Lain-lain	(22,202,226,899)	(22,196,690,000)	5,536,899
Jumlah	(22,202,226,899)	(22,196,690,000)	5,536,899

*Uang Muka dari
KPPN Rp
123,000,000*

C.24 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp 123,000,000 dan Rp0 ,-. Uang

Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Utang kepada Pihak Ketiga Rp 317,213,627

C.25 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp 317,213,627 dan Rp 50,983,137. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan.

Pendapatan yang Ditangguhkan Rp0

C.26 Pendapatan yang Ditangguhkan

Nilai Pendapatan Ditangguhkan per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Pendapatan yang Ditangguhkan merupakan pendapatan negara yang belum disetorkan ke Kas Negara pada tanggal pelaporan. Pendapatan tersebut merupakan pendapatan PNBPN, pengembalian belanja, serta pungutan/potongan pajak yang belum disetorkan ke kas negara pada tanggal 31 Desember 2018.

Rincian Pendapatan yang Ditangguhkan pada Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan per tanggal pelaporan disajikan sebagai berikut:

Rincian Pendapatan yang Ditangguhkan

Uraian	Jumlah
Pendapatan PNBPN	-
PPH yang belum disetor	-
Total	-

*Pendapatan
Diterima di
Muka
Rp0,-*

C.27 Pendapatan Diterima di Muka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 0,- dan Rp 193,220,932,-. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan.

*Beban yang
Masih Harus
Dibayar Rp0*

C.28 Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang Masih Harus Dibayar per 30 Juni 2024 dan 2023 sebesar Rp0 dan Rp0, merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya, dengan rincian sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Beban yang Masih Harus Dibayar TA
2024 dan TA 2023*

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	0	-
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	0	-
Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar	0	-
Jumlah	-	-

*Ekuitas
Rp
108,701,302,119*

C. Ekuitas

Ekuitas per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 108,701,302,119 ,- dan Rp 111,864,273,522 ,- . Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

*Pendapatan
PNBP
Rp769,848,113*

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp 769,848,113,- dan Rp 183.342.350,- Pendapatan tersebut terdiri dari :

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahun 2024 dan 2023

URAIAN	TH 2024	TH 2023	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Sewa Tanah,gedung,da Bangunan	12,554,000	0	0.00
Pendapatan Penggunaan Saranadan Praarana sesuai dengan Tusi	538,108,123	11,512,130	97.86
Pendapatan Jasa Pelabuhan Perikanan	219,185,990	194,854,480	11.10
Pendapatan Jasa Lainnya	0	0	#DIV/0!
Jumlah Pendapatan	769,848,113	183,342,350	76.18

Pendapatan Jasa Pelabuhan Perikanan merupakan Pendapatan-LO yang diperoleh dari sewa lahan, tambat labuh, pas masuk dan jasa kebersihan pelabuhan.

*Beban Pegawai
Rp 3,792,834,509*

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 3,792,834,509,- dan Rp 2.717.122.125,-.

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai Tahun 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2024	TH 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji	1,510,338,683	1,091,898,520	27.71
Beban Tunjangan-tunjangan	2,260,472,826	1,610,030,605	28.77
Beban Honorarium dan Vakasi	0	0	0.00
Beban Lembur	22,023,000	15,193,000	31.01
Jumlah Belanja	3,792,834,509	2,717,122,125	28.36

*Beban
Persediaan
Rp 37,599,360*

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 37,599,360,- dan Rp 19.513.970,-. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan Tahun 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2024	TH 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	37,599,360	19,513,970	
Beban Persediaan Bahan Untuk Pemeliharaan	0	0	0.00
Beban Persediaan Suku Cadang			0.00
Beban Persediaan Lainnya	-	-	0.00
Jumlah Beban Persediaan	37,599,360	19,513,970	48.10

*Beban Barang
dan Jasa Rp
2,098,199,020*

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 2,098,199,020,- dan Rp 2.661.222.392,-. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2024	TH 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Barang Operasional	751,534,416	1,235,599,476	-64.41
Beban Langganan Daya dan Jasa	484,236,350	129,917,767	73.17
Beban Jasa Pos dan Giro	0	716,000	-100.00
Beban Jasa Konsultan	0	0	0.00
Beban Jasa Profesi	1,800,000	18,900,000	-950.00
Beban Jasa Lainnya	859,522,254	1,276,089,149	-48.46
Beban Jasa Penanganan Pandemi Covid-19	0	0	
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	1,106,000	0	100.00
Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	0	0	0.00
Beban Aset Ekstrakomtabel Aset Tetap Lainnya	0	0	0.00
Jumlah	2,098,199,020	2,661,222,392	-26.83

Beban

Pemeliharaan

Rp 424,337,919

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 424,337,919,- dan Rp 422.259.617,-. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan Tahun 2024 dan 2018

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2024	TH 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	172,831,603	160,286,615	7.26
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	0	0	0.00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	188,761,892	194,197,093	-2.88
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	0	0.00
Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	1,673,750	16,004,000	-856.18
Beban Pemeliharaan Irigasi	5,252,600	11,122,700	-111.76
Beban Pemeliharaan Jaringan	55,818,074	40,649,209	27.18
Beban Persediaan Bahan Untuk Pemeliharaan			
Beban Persediaan Suku Cadang	0	0	0.00
Jumlah	424,337,919	422,259,617	0.49

Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan senilai Rp172.831.603,- berupa pemeliharaan halaman gedung, gedung permanen, bangunan TPI permanen serta bangunan parkir, tempat ibadah. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin senilai Rp188.761.892,- berupa pemeliharaan kendaraan bermotor, peralatan kantor serta peralatan dan mesin. Pemeliharaan Jalan dan Jembatan senilai Rp1.673.750

berupa pemeliharaan dermaga. Pemeliharaan Irigasi senilai Rp5.252.600 berupa pemeliharaan drainase jaringan air. Pemeliharaan Jaringan senilai Rp55.818.074,- berupa pemeliharaan jaringan air dan listrik.

*Beban
Perjalanan
Dinas
Rp 520,685,064*

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 520,685,064,- dan Rp 887.332.758,-. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2024	TH 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	430,766,847	729,335,011	-69.31
Beban Perjalanan Tetap			0.00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	300,000	-100.00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	39,600,000	134,750,000	-240.28
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	50,318,217	22,947,747	54.39
Jumlah	520,685,064	887,332,758	-70.42

*Beban Barang
untuk
Diserahkan
kepada
Masyarakat
Rp0*

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Dalam hal ini, Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambangan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2017.

Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2024	TH 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	-	-
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	-	-
Jumlah	0	-	-

Beban Bantuan Sosial Rp0 **D.8 Beban Bantuan Sosial**

Beban Bantuan Sosial Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Rincian Beban Bantuan Sosial untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Bantuan Sosial Tahun 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2024	TH 2023	% NAIK (TURUN)
Beban Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial	0	-	-
Beban Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial	0	-	-
Beban Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial	0	-	-
Jumlah	0	-	-

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp 3,396,392,286 **D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi**

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 3,396,392,286,- dan Rp 4.474.844.271,-.

Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan

Amortisasi untuk tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2024 dan 2023

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	TH 2024	TH 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	461,345,442	600,795,469	-30.23
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	262,431,767	248,916,628	5.15
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, Jaringan	2,645,592,358	3,624,433,922	-37.00
Beban Penyusutan Properti Investasi	26,804,094		
Beban Penyusutan Aset Tetap Yang Tidak Digu	218,625	698,252	0.00
Jumlah Penyusutan	3,396,392,286	4,474,844,271	-31.75
			0.00
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	-	-	0.00
Beban Penyusutan aset lain-lain	-	-	0.00
Jumlah Amortisasi	-	-	0.00
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	3,396,392,286	4,474,844,271	(31.75)

*Beban
Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih
Rp8,724,835*

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp8,724,835,- dan Rp325.083,-. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2023	TH 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	8,724,835	325,083	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Non Lancar	0	0	-
Jumlah	8,724,835	325,083	-

Surplus dari
Kegiatan Non
Operasional
(Rp 20,012,033)

D.12 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok Dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2024 dan 2023 masing-masing (Rp20,012,033,-) dan Rp89.790.673,-. Rincian kegiatan non operasional Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional Tahun 2024 dan 2023

URAIAN	TH 2023	TH 2023	NAIK (TURUN) %
Surplus Penjualan Aset Non Lancar	0	0	
Penjualan Alat Angkut Darat	0	0	-
Defisit Penjualan Aset Non Lancar			
Penjualan Alat Kantor	0	0	-
Defisit Selisih Kurs	0	0	-
Surplus Defisit kegiatan Non Operasional lainnya	(20,012,033)	89,790,673	
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	(20,012,033)	89,790,673	-122.29

Pos Luar Biasa
Rp0

D.13 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Pos Luar Biasa Tahun 2024 dan 2023

URAIAN	TH 2024	TH 2023	NAIK (TURUN) %
Pendapatan PNBPN	0	-	-
Beban Perjalanan Dinas	0	-	-
Beban Persediaan	0	-	-
Jumlah	0	-	-

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal

Rp 111,864,273,522

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 111,864,273,522,- dan Rp114.347.484.191,-

Defisit LO

Rp9,511,487,243

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp9,511,487,243,- dan Rp10.908.837.027,-. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/deficit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Koreksi Nilai

Persediaan Rp0

E.3 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Persediaan

Jenis Persediaan	Koreksi
Barang Konsumsi	-
Suku Cadang	-
Jumlah	-

Koreksi Atas

Reklasifikasi

Rp0

E.4 Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi Atas Reklasifikasi untuk tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Rincian

Koreksi Atas Reklasifikasi untuk tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Persediaan

Jenis Koreksi	Koreksi
Koreksi atas Reklasifikasi	-
	-
Jumlah	-

*Koreksi Nilai
Aset Tetap Rp0*

E.5 Koreksi Nilai Aset Tetap

Koreksi atas Nilai Perolehan Aset Tetap merupakan koreksi atas kesalahan pencatatan kuantitas aset pada laporan keuangan. Koreksi pencatatan aset tetap untuk tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Nilai Koreksi Aset Tetap

Jenis Aset Tetap	Koreksi
Peralatan dan Mesin	-
Koreksi Nilai Saldo Awal	-
Jumlah	-

*Koreksi Atas
Beban Rp0*

E.6 Koreksi Atas Beban

Koreksi Atas Beban merupakan koreksi atas kesalahan pengakuan beban yang terjadi pada periode sebelumnya dan baru diketahui pada periode berjalan. Koreksi kurang atas beban untuk tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian untuk tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Atas Beban

Jenis Beban	Jumlah Koreksi
Beban Pegawai	-
Beban Jasa	-
Jumlah	-

*Koreksi Atas
Pendapatan
Rp0*

E.7 Koreksi Atas Pendapatan

Koreksi Atas Pendapatan merupakan koreksi atas kesalahan pengakuan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dan baru diketahui pada periode berjalan. Koreksi tambah atas Pendapatan untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Koreksi Atas Pendapatan untuk Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Atas Pendapatan

Jenis Pendapatan	Koreksi
Pendapatan Jasa Pelatihan	-
Pendapatan Lainnya	-
Jumlah	-

*Koreksi Hibah
Masuk/ Keluar
Rp0*

E.8 Koreksi Hibah Masuk/Keluar

Koreksi Atas Hibah Masuk/Keluar merupakan pencatatan atas hibah masuk/keluar berupa hibah barang. Koreksi pencatatan aset tetap untuk tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Koreksi Hibah Masuk/Keluar untuk tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Nilai Koreksi Hibah Masuk/Keluar

Jenis Koreksi	Koreksi
Hibah Peralatan dan Mesin	-
Jumlah	-

*Ekuitas Akhir
Rp108,701,302,119*

E.9 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 108,701,302,119,- dan Rp 110.341.691.240,-.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

- Terdapat akun 138311 pada neraca. Hal ini karena terdapat Properti Investasi berupa Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar senilai Rp. 2,680,409,415
- Terdapat nilai pada akun 166112 - Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan senilai Rp22.196.690.000,00 termasuk didalamnya dredger yang dilelang tahun ini namun tidak ada penawar. (terlampir)
- Outstanding Kontrak mulai Januari s.d Juni 2024 senilai Rp991.495.183,00. Termasuk didalamnya pekerjaan yang sudah lewat kontrak namun pekerjaan belum selesai yaitu pada
 - a. Konsultan Perencana Rehab Treastle Dermaga mulai kontrak 13 feb s.d 13 maret 2024 namun masih terdapat sisa kontrak Rp6.800.082 berupa 20% yang akan dicairkan ketika konstruksi selesai
 - b. Pengadaan jasa pelaksana keamanan mulai kontrak 01 s.d 31 Januari 2024 namun masih terdapat sisa kontrak Rp249.859,00 berupa kewajiban BPJS yang tidak dibayarkan oleh pihak ketiga
 - c. Pengadaan jasa petugas kebersihan mulai kontrak 01 s.d 31 Januari 2024 namun masih terdapat sisa kontrak Rp187.395,00 berupa kewajiban BPJS yang tidak dibayarkan oleh pihak ketiga
- Konstruksi dalam pengerjaan senilai Rp27.200.328,00 berupa Konsultan Perencana Rehab Treastle Dermaga Teluk Awang
- Kerugian pelepasan aset senilai Rp22.542.476,00 berupa penghapusan MCK/toilet senilai perolehan

Rp28.298.000,00 dengan penyusutan Rp5.755.524,00.

- Utang yang belum diterima tagihannya senilai Rp7.488.500,00 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tgl dan No Bukti	Nama Penerima dan Keperluan	Akun	Jumlah
1	00984/KW/633693/2024 24-06-2024	RM. Padang Jingga Belanja Konsumsi Dalam Rangka Audit ISO 14001 Tahun 2015	2338.BGA. 521211	720,000
2	00985/KW/633693/2024 24-06-2024	Koperasi Karyawan Harapan Terpadu Belanja Konsumsi Dalam Rangka Audit ISO 14001 Tahun 2015	2338.BGA. 521211	360,000
3	00986/KW/633693/2024 24-06-2024	Toko Sinar Laut Belanja ATK Dalam Rangka Audit ISO 14001 Tahun 2015	2338.BGA. 521211	150,000
4	00987/KW/633693/2024 24-06-2024	Toko Sinar Laut Belanja Komputer Suplies Dalam Rangka Audit ISO 14001 Tahun 2015	2338.BGA. 521211	150,000
5	00999/KW/633693/2024 25-06-2024	PT. Queen Digital Printing Pengadaan Spanduk Kegiatan Pengukuran Tingkat Pelayanan Usaha di Pelabuhan (IKM)	2338.BGA. 521211	300,000
6	01000/KW/633693/2024 25-06-2024	RM. Padang Jingga Belanja Konsumsi (Makan) Kegiatan Pengukuran Tingkat Pelayanan Usaha di Pelabuhan (IKM)	2338.BGA. 521211	1,200,000
7	01001/KW/633693/2024 02-07-2024	Koperasi Karyawan Harapan Terpadu Belanja Keperluan Sehari-hari perkantoran	2342.EBA. 994.002A.5 21111	1,728,500
8	01004/KW/633693/2024 02-07-2024	I Gede Agus Juniantara Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Rapat Teknis Monitoring Penerapan SHTI di Pelabuhan Perikanan Benoa 10 sd. 11 Juni 2024	2338.BGA. 002.052A.5 24111	960,000
9	01003/KW/633693/2024 02-07-2024	I Gede Agus Juniantara Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Rapat Teknis Monitoring Penerapan SHTI di Pelabuhan Perikanan Benoa 10 sd. 11 Juni 2024	2338.BGA. 002.052A.5 24111	960,000
10	01002/KW/633693/2024 02-07-2024	Havinda Nur Septama Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Rapat Teknis Monitoring Penerapan SHTI di Pelabuhan Perikanan Benoa 10 sd. 11 Juni 2024	2338.BGA. 002.052A.5 24111	960,000
Jumlah				7,488,500

VI. LAMPIRAN DAN DAFTAR



KEPUTUSAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 91 /KEPMEN-KP/SJ/PL.750/2024

TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
YANG DIKELOLA OLEH DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP PADA
PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PENGAMBENGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu menghapuskan Barang Milik Negara dari Daftar Barang Pengguna yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap pada Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penghapusan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap pada Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
4. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 89);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu Dari Pengelola Barang Kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1292);
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);
9. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54/KEPMEN-KP/PL.720/2022 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Menteri Kelautan dan Perikanan Selaku Pengguna Barang dalam bentuk Mandat kepada Pejabat Tertentu dalam rangka Pengelolaan Aset berupa Barang Milik Negara dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

- Memperhatikan :**
1. Surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Singaraja atas nama Menteri Keuangan Nomor S-54/MK.6/KNL.1402/2023 tanggal 18 Oktober 2024 hal Persetujuan Penjualan Barang Milik Negara berupa Tanah dan/atau Bangunan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan R.I;
 2. Salinan Risalah Lelang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Singaraja Nomor 469/66/2023 tanggal 13 Desember 2023;

3. Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Nomor B.5635/PPN.PGB/PL.750/XII/2023 tanggal 21 Desember 2023.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN YANG DIKELOLA OLEH DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP PADA PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PENGAMBENGAN.
- KESATU : Menghapus Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap pada Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan berupa 1 (satu) unit Gedung dan Bangunan dengan nilai perolehan seluruhnya sebesar Rp28.298.000,00 (dua puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud diktum KESATU dihapus dari Daftar Barang Pengguna yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap pada Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan.
- KETIGA : Hasil penghapusan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dilaporkan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan melalui Sekretaris Jenderal paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak ditetapkannya penghapusan Barang Milik Negara.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 31 Januari 2024

a.n. MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BIRO KEUANGAN,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN RI
NOMOR 91 /KEPMEN-KP/SJ/PL.750/2024
TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
YANG DIKELOLA OLEH DIREKTORAT JENDERAL
PERIKANAN TANGKAP PADA PELABUHAN PERIKANAN
NUSANTARA PENGAMBENGAN

DAFTAR BMN YANG DIHAPUSKAN

Eselon I : Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
Satker : Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan
Kode Satker : 032.03.2200.633693.000.KD

No	Kode Barang	NUP	Nama Barang	Lokasi	Luas (m2)	Nilai Perolehan	Kondisi
1	5020605007	1	Bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK)	Pengambengan, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana	19	28.298.000	Rusak Berat
Jumlah						28.298.000	

a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan RI
Kepala Biro Keuangan,



**DAFTAR BMN YANG DIHENTIKAN PENGGUNAANNYA
UNTUK PERIODE SAMPAI DENGAN TANGGAL 29 JUNI 2024**

NAMA UAKPB : PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PENGAMBENGAN
KODE UAKPB : 032.03.22.00.633693.000.KD

TANGGAL : 11-07-2024
HALAMAN : 1dar 1

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
1	3.01.02.01.001	1	Suction Dredger	RUSAK BERAT	04-12-2014	DREDGE 400 HP 6 SILINDER	-	04-12-2014	22,186,186,000		Henti Guna
2	3.10.01.02.002	34	Lap Top	RUSAK BERAT	28-03-2019	HP / 14-cf0044TX	-	28-03-2019	8,755,000		Henti Guna
3	3.10.02.03.003	43	Printer (Peralatan Personal Komputer)	RUSAK BERAT	14-07-2020	EPSON L120	-	14-07-2020	1,749,000		Henti Guna
JUMLAH									22,196,690,000		

JEMBERANA, 11 JULI 2024
PENANGGUNG JAWAB UAKPB
Kepala Pelabuhan



Andi Marnojengi, S.St.Pi, M.Si
NIP. 197504172002121002



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PENGAMBENGAN

JALAN PELABUHAN NO. 1 PENGAMBENGAN KEC. NEGARA,
KAB. JEMBRANA - BALI KODE POS 82251
TELEPON (0365) 42968, Ext.1

Laman <https://kkp.go.id/djpt/ppnpengambengan> E-mail ppn.pengambengan@kkp.go.id

Nomor : B.2104/PPN.PGB/PL.430/VII/2024
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (berkas)
Hal : Permohonan Peninjauan Limit

4 Juli 2024

Yth. Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
Kementerian Kelautan dan Perikanan
di Jakarta

Berdasarkan Risalah Lelang Nomor 178/14.02/2024-01 tanggal 12 Juni 2024 (copy terlampir), barang bergerak yang di lelang 1 (satu) unit Barang Milik Negara berupa Suction Dredger merk/type IMS Versi Dredger 7012 HP dalam kondisi rusak berat dengan nilai limit Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dimana dalam pelaksanaan lelangnya tidak ada yang mengajukan penawaran, untuk itu kami mohon dapat dilakukan peninjauan ulang nilai limit.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Pelabuhan Perikanan
Nusantara Pengambengan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Andi Mannoengi

Tembusan :

1. Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap;



SALINAN/GROSSE
RISALAH LELANG

NOMOR : 178/14.02/2024-01
TANGGAL : 12 Juni 2024
PEJABAT LELANG : Raden Arif Suharsono, S.E., M.M.
PENJUAL : Pelabuhan Perikanan Nusantara
Pengambangan

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
SINGARAJA

Lembar Pertama
Pejabat Lelang

Ttd.

Raden Arif Suharsono, S.E., M.M.
NIP 19750214 199602 1 001

SALINAN
RISALAH LELANG
Nomor 178/14.02/2024-01

-----Pada hari ini Rabu tanggal dua belas bulan Juni tahun dua ribu dua puluh empat (12-06-2024), dimulai pukul sembilan (09:00) Waktu Server aplikasi lelang melalui internet sesuai Waktu Indonesia Barat oleh saya: -----

--- Raden Arif Suharsono, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen, NIP 19750214 ---
----- 199602 1 001 -----

Pejabat Lelang Kelas I yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 04/KM.6/UP.11/2011 tanggal 10 Maret 2011, berkedudukan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Singaraja berdasarkan Surat Tugas Nomor ST-376/KNL.1402/2024 tanggal 20 Mei 2024 dilaksanakan Lelang Non Eksekusi Wajib Barang Milik Negara bertempat di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL Singaraja), Jalan Udayana Nomor 10, Singaraja. -----

-----Pelaksanaan lelang ini dilakukan atas permintaan Andi Mannoengi, NIP 19750417 200212 1 002, Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambangan, berkedudukan di Jalan Pelabuhan Nomor 1, Pengambangan, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, sesuai Surat Permohonan Lelang Nomor B.1274/PPN.PGB/PL.430/IV/2024 tanggal 26 April 2024, yang telah ditetapkan jadwal lelangnya sesuai Surat Penetapan Lelang Nomor S-404/KNL.1402/2024 tanggal 20 Mei 2024 guna melaksanakan Surat Keputusan Nomor S-884/MK.6/2023 Tanggal 27 Desember 2023. -----

-----Dalam pelaksanaan lelang ini Saudara: -----
Lukman Hadi berdasarkan Surat Keputusan Pembentukan Panitia Penjualan Lelang/Surat Penunjukkan Pejabat Penjual Nomor 82/KPA/OT.210/I/2024 Tanggal 8 Januari 2024 / B.1275/PPN.PGB/PL.430/IV/2024 Tanggal 26 April 2024 melaksanakan penjualan lelang dengan perantaraan KPKNL Singaraja. -----

-----Barang bergerak yang dilelang berupa: -----
1 (satu) unit Barang Milik Negara berupa Suction Dredger merk/tipe IMS Versi Dredger 7012 HP dalam kondisi rusak berat/scrap -----
Nilai Limit : Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) -----
Barang bergerak tersebut saat ini berada di Kantor Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambangan. -----
dilelang apa adanya. -----

-----Pelelangan ini telah diumumkan oleh Penjual melalui Surat Kabar Harian Jawa Pos Radar Bali tanggal 05 Juni 2024. -----

-----Dalam pelaksanaan.../Lembar Terakhir

Lembar terakhir dari Risalah Lelang Nomor : 178/14.02/2024-01 tanggal 12 Juni 2024

-----Dalam pelaksanaan lelang ini tidak ada yang mengajukan penawaran.-----

Penjual

Pejabat Lelang

Ttd.

Ttd.

Lukman Hadi
NIP 19820219 200502 1 002

Raden Arif Suharsono, S.E.,
M.M.
NIP 19750214 199602 1 001

Diberikan: SALINAN sesuai dengan aslinya

Tanggal: 12 JUN 2024

Kepala KPKNL Singaraja



Lucillus Wenang Cailendra Hidajat
NIP 19681031 199603 1 001

KARTU KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

DITJEN PERIKANAN TANGKAP

Provinsi Bali

NAMA UAKPB : PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PENGAMBENGAN

KODE UAKPB : 032.03.22.00.633693

Tanggal : 11/07/2024

Halaman : 8 dari 8

Kode Lap : K-KDP

KODE KDP : 7010101005	LOKASI KDP
NAMA KDP : Aset Tetap Lainnya Dalam Pengerjaan	Jln. Pelabuhan No.1, Ds. Mertak, Kec. Pujut, Kab. Lombok Tengah - NTB
NOMOR KDP : 5	
FUNGSI/SUB FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN	
CARA PEMBANGUNAN -	

No.	Tgl Buku	No. Kontrak Nama Kontraktor Nilai Kontrak	Mutasi		Saldo KDP	Keterangan
			Tambah	Kurang		
1	19-03-2024	B.542/PPN.PGB/KP.440/II/2024 3 DIMENSI CONSULTANT 34.000.410	27.200.328	0	27.200.328	-

JEMBRAN, 11 JULI 2024
PENYUSUN: JRY AB UAKPB
Kepala Pelabuhan



Andi Mannoengi, S.St.Pi, M.Si

NIP. 197504172002121002

LISTING SEJARAH TRANSAKSI BARANG MILIK NEGARA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL

S/D 29 Juni 2024

Tanggal : 11-07-2024

Halaman : 1

Kode Lap : LDBMNSI

NAMA : 032.03.2200.633693.000.KD PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PENGAMBENGAN

SUBSUB KELOMPOK BARANG		NUP	SAT	TGL. BUKU	JNS TRN	URAIAN TRANSAKSI	TGL. PEROLEHAN / TGL. AWAL PAKAI / TGL. KOREKSI (214)	TERCATAT	KD RUANG / NO KIB	KUANTITAS	NILAI	SISA MANFAAT	STATUS PERSTJ.
KODE	URAIAN												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.02.06.05.007	Bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK)	1	Unit	31-12-2021	135	Perolehan Migrasi SIMAK	26-12-2007 26-12-2007	DBL	-	1	28,298,000	51	APR
5.02.06.05.007	Bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK)	1	Unit	31-12-2021		Penyusutan Transaksional				0	-3,837,016	51	APR
5.02.06.05.007	Bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK)	1	Unit	30-06-2022	931	Penyusutan Aset Tetap				0	-479,627	50	APR
5.02.06.05.007	Bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK)	1	Unit	31-12-2022	931	Penyusutan Aset Tetap				0	-479,627	49	APR
5.02.06.05.007	Bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK)	1	Unit	22-05-2023	203	Koreksi Perubahan Kondisi				0	0	49	APR
5.02.06.05.007	Bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK)	1	Unit	23-05-2023	401	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan				-1	-28,298,000	49	APR
5.02.06.05.007	Bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK)	1	Unit	23-05-2023		Penyusutan Transaksional				0	4,796,270	49	APR
5.02.06.05.007	Bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK)	1	Unit	23-05-2023	188	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	26-12-2007 26-12-2007			1	28,298,000	49	APR
5.02.06.05.007	Bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK)	1	Unit	23-05-2023		Penyusutan Transaksional				0	-4,796,270	49	APR
5.02.06.05.007	Bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK)	1	Unit	30-06-2023	931	Penyusutan Aset Tetap				0	-479,627	48	APR
5.02.06.05.007	Bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK)	1	Unit	31-12-2023	931	Penyusutan Aset Tetap				0	-479,627	47	APR
5.02.06.05.007	Bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK)	1	Unit	03-06-2024	911	Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan				-1	-28,298,000	47	APR
5.02.06.05.007	Bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK)	1	Unit	03-06-2024		Penyusutan Transaksional				0	5,755,524	47	APR
5.02.06.05.007	Bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK)	1	Unit	03-06-2024	301	Penghapusan				0	0	47	APR
5.02.06.05.007	Bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK)	1	Unit	03-06-2024		Penyusutan Transaksional				0	0	47	APR
										0	0		
5.02.06.05.007	Bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK)	2	Unit	14-11-2023	103	Hibah Masuk	13-09-2023 13-09-2023	Belum Tercatat	-	1	83,583,000	80	APR
5.02.06.05.007	Bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK)	2	Unit	14-11-2023		Penyusutan Transaksional				0	0	80	APR
5.02.06.05.007	Bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK)	2	Unit	21-11-2023	305	Koreksi Pencatatan				-1	-83,583,000	80	APR
5.02.06.05.007	Bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK)	2	Unit	21-11-2023		Penyusutan Transaksional				0	0	80	APR
										0	0		

REKAP PIUTANG TAHUN 2024

NO	NAMA KAPAL	PEMILIK	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TOTAL	SISA BELUM
1	BINTANG KLASIK	YAHYA	lunas	12,891,730	327,678	13,219,408	11,965,365
2	BERLIAN NURVA	DIDI FARRULLAH		LUNAS	1,896,200	1,896,200	1,896,200
3	BINTANG KRANTIL	MUHLISIN		6,157,830	1,227,173	7,385,003	6,157,830
4	SINAR/CAHAYA KRANTIL	AHMAD SOPYAN HABIBI		1,873,425	1,628,900	3,502,325	3,502,325
5	SINAR AZWA	H. SURADI		LUNAS	3,328,825	3,328,825	1,828,825
6	BINTANG MULYA	IRWAN EFENDI		6,926,945	1,250,118	8,177,063	7,025,043
7	BINTANG BARU	SODIKIN		6,166,300	2,485,605	8,651,905	8,651,905
8	BINTANG RENJANI	SAKIRIN	8,048,656	27,800	-	8,076,456	8,076,456
9	BERKAH RAHAYU	AGUS (POLTEK)	504,000	3,664,625	1,630,000	5,798,625	5,798,625
10	HAIKAL ISTAMBUL	MARJUKI		1,322,685	2,166,055	3,488,740	3,488,740
11	SINAR PERMATA	RADEN ANDI SUYANTO	301,722	3,119,020	-	3,420,742	3,420,740
12	SINAR MUTIARA	RADEN ABU SUPIAN	308,133	5,359,710	442,730	6,110,573	5,667,843
13	SINAR INTAN	RADEN ABU SUPIAN	201,733	4,953,985	599,085	5,754,803	5,155,718
14	SINAR BERLIAN		264,704	1,483,745	-	1,748,449	1,748,449
15	SINAR SAMUDRA	MUSAWIR	7,742,843	245,250	-	7,988,093	7,988,093
16	KOTA JAYA/bintang AMANAH	MIFTA SURGANA		LUNAS	575,525	575,525	230,575
17	SUMBER BUNGA/SMBR REJEKI	NURUDIN		LUNAS	4,507,000	4,507,000	2,586,875
18	SUMBER TENANG/SB MUNCUL	RONI		11,381,938	408,010	11,789,948	11,789,948

NO	NAMA KAPAL	PEMILIK	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TOTAL	SISA BELUM
19	BINTANG DIRHAM	SOBIRIN	2,172,445	3,554,465	-	5,726,910	5,726,910
20	PRATIWI	H. YAHYA		313,750	-	313,750	313,750
21	SINAR BAHARI	AHMAD NURIYADI		525,000	2,989,300	3,514,300	3,514,300
22	SAMUDRA INDAH MAS	MUHLIS		-	2,244,750	2,244,750	1,241,750
23	SRIWIJAYA	RONI SAPA'AT			781,361	781,361	413,800
	J U M L A H		19,544,236	69,968,203	28,488,315	118,000,754	108,190,065